

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN INFORMASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ALI SANDER

Universitas Sultan Muhammad Syafuiddin Sambas
alisanderw@gmail.com

Abstract

This article aims to analyse the digital transformation strategy for information services at the Sambas Regency Regional Library and Archives Office through a literature review approach. The research findings indicate that, empirically, the management of archives and information services at regional library institutions still faces challenges in terms of infrastructure, human resource competencies, the strengthening of digital systems, and service governance that is not yet fully integrated. On the other hand, digital transformation is capable of improving service efficiency, expanding access to information, supporting the preservation of collections, and strengthening the relevance of regional libraries in an era of fast-paced information needs. The most important strategies include analysing service needs, strengthening digital governance, developing information technology infrastructure, digitising priority collections and archives, enhancing the competencies of librarians and archivists, developing user-centred service platforms, and conducting continuous evaluation of service quality. With a well-planned and phased strategy, the Sambas Regency Regional Library and Archives Service has the opportunity to build information services that are more effective, adaptive, inclusive and responsive to the needs of the local community in the digital age.

Keywords: *digital transformation, information services, regional libraries, regional archives, Sambas Regency, literature review.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis strategi transformasi digital layanan informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas melalui pendekatan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris, pengelolaan arsip dan layanan informasi pada institusi perpustakaan daerah masih menghadapi kendala pada aspek sarana prasarana, kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem digital, dan tata kelola layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Di sisi lain, bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses informasi, mendukung preservasi koleksi, dan memperkuat relevansi perpustakaan daerah di era kebutuhan informasi yang serba cepat. Strategi yang paling penting meliputi analisis kebutuhan layanan, penguatan tata kelola digital, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, digitalisasi koleksi dan arsip prioritas, peningkatan kompetensi pustakawan dan arsiparis, pengembangan platform layanan berbasis pengguna, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Dengan strategi yang terencana dan bertahap, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas berpeluang membangun layanan informasi yang lebih efektif, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal di era digital.

Kata kunci: transformasi digital, layanan informasi, perpustakaan daerah, kearsipan daerah, Kabupaten Sambas, kajian pustaka.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Perpustakaan dan kearsipan sebagai institusi penyedia informasi publik tidak dapat menghindari dampak dari transformasi digital ini. Institusi perpustakaan tradisional yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku fisik kini harus bertransformasi menjadi ekosistem informasi yang aksesibel secara digital 24 jam sehari (Azizah et al., 2025).

Di Indonesia, transformasi digital perpustakaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI. Pada awal tahun 2022, Perpustakaan Nasional mengangkat tagline "Perpustakaan Nasional Menuju Transformasi Digital Untuk Menciptakan Ekosistem Digital Nasional" sebagai arahan strategis untuk seluruh kegiatan perpustakaan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kegiatan konvensional dan manual yang selama ini dilakukan serta mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber informasi di era digital (Wibawa, 2021). Program transformasi digital ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai media digital, Integrasi dengan kebijakan satu data pemerintah, dan optimalisasi infrastruktur teknologi informasi.

Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan tersendiri dalam mengadopsi transformasi digital di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 91 Tahun 2021 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, 2021). Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan perpustakaan di wilayah Kabupaten Sambas serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

Kondisi eksisting pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas masih menggunakan media konvensional seperti cabinet filing dan filing shelves untuk penyimpanan arsip. Fasilitas dan infrastruktur kearsipan yang minimal menyebabkan penyimpanan arsip belum memanfaatkan teknologi digital sebagai media penyimpanan utama (Sari & Zulaikha, 2020). Hal ini jauh berbeda dengan perkembangan teknologi saat ini yang sudah menggunakan sistem digital untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip. Pemeliharaan arsip hanya dilakukan secara periodik setiap 3 bulan dengan cara sederhana seperti pemberian camphor di setiap media penyimpanan arsip.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat digitalisasi layanan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi seperti jaringan internet nirkabel, layanan peminjaman tanpa kontak langsung, serta platform konferensi video (Sukatari & Suryanto, 2024). Pengalaman during pandemi menunjukkan bahwa perpustakaan yang telah memiliki infrastruktur digital dapat tetap memberikan layanan kepada masyarakat meskipun dalam kondisi keterbatasan fisik. Studi ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan Bappeda Kota Padang sangat penting untuk meningkatkan layanan informasi, termasuk sistem otomasi perpustakaan dan repositori digital.

Tantangan utama transformasi digital perpustakaan di Indonesia mencakup kesenjangan digital, keterbatasan kompetensi pustakawan, isu keamanan siber, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung adaptasi digital. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjadi dasar regulasi yang menghambat adaptasi penuh terhadap transformasi digital karena masih berfokus pada aspek konvensional (Azizah et al., 2025). Kesenjangan digital terutama terasa di wilayah terpencil seperti Kalimantan Barat yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dibandingkan dengan daerah di Jawa.

Inovasi teknologi seperti artificial intelligence untuk rekomendasi personalisasi, blockchain untuk preservasi aman, dan virtual reality untuk pengalaman imersif telah merevolusi aksesibilitas dan efisiensi layanan perpustakaan (Santosa, 2025). Perpustakaan hybrid menjadi model modern yang mengurangi ketergantungan pada koleksi fisik sambil memperluas jangkauan global melalui portal digital dan sistem temu kembali informasi canggih. Namun, tantangan teknis seperti digitalisasi masif koleksi, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil Indonesia, serta isu keamanan cloud dan hak cipta menuntut investasi strategis serta kebijakan adaptif.

Pengembangan sistem informasi perpustakaan digital memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan bagi pengguna. Pentingnya transformasi digital dalam manajemen perpustakaan terletak pada upaya meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan terhadap kebutuhan pengguna yang semakin beragam (Yuan et al., 2023). Digitalisasi arsip dan manajemen dokumen elektronik menjadi strategi kunci dalam transformasi digital layanan informasi perpustakaan dan kearsipan daerah.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi di Indonesia sehingga membuat pemerintah harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government (Nafsi & Octavia, 2024). E-government di bidang perpustakaan berkembang melalui empat fase, mulai dari layanan terotomasi hingga fase integrasi di mana perpustakaan terintegrasi dengan lembaga sejenis lainnya dalam penyediaan informasi koleksi dan transfer data. Fase integrasi ini ditandai dengan keberadaan Katalog Induk Nasional dan sistem repository yang terintegrasi dengan lembaga lain.

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, waktu, dan partisipasi masyarakat menjadi kendala utama yang dihadapi perpustakaan daerah dalam implementasi transformasi digital (Azmam et al., 2025). Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah mengimplementasikan berbagai inovasi seperti penerbitan buku digital, penyediaan ebook, dan festival film pendek masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan peran sebagai pusat pelestarian budaya di era digital. Penguatan kapasitas SDM, peningkatan anggaran, serta literasi digital menjadi syarat untuk mengoptimalkan transformasi digital.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi titik kritis dalam transformasi digital perpustakaan. Skill gap pustakawan senior dalam data analytics, cybersecurity, dan integrasi AI ditambah resistensi budaya terhadap perubahan menghambat adopsi penuh teknologi digital (Santosa, 2025). Pelatihan ulang intensif melalui blended learning, mentoring antar-generasi, dan insentif karir seperti sertifikasi digital menjadi imperatif untuk menjembatani ketidaksiapan ini. Pelatihan tenaga perpustakaan desa di Kabupaten Sambas tahun 2023 menunjukkan upaya peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan di tingkat daerah (Sekuduk, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi transformasi digital layanan informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas melalui pendekatan kajian pustaka. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi eksisting, tantangan, dan strategi implementasi transformasi digital yang sesuai dengan konteks daerah. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi transformasi digital perpustakaan dan kearsipan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sambas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji strategi transformasi digital layanan informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. Metode kajian pustaka dilakukan melalui pencarian sistematis literatur ilmiah di berbagai sumber database seperti Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui content analysis dengan bantuan perangkat lunak Zotero untuk manajemen referensi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk mengidentifikasi pola inovasi dan tantangan dalam transformasi digital perpustakaan. Pendekatan kajian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya untuk membangun kerangka pemahaman komprehensif tentang strategi transformasi digital yang sesuai dengan konteks daerah seperti Kabupaten Sambas (Zed, 2008); (Walliman & Walliman, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Digital dalam Layanan Informasi Publik

Transformasi digital merupakan proses strategis yang mengubah cara kerja organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru dalam layanan dan operasi. Dalam konteks pelayanan publik, transformasi digital menjadi solusi penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat (Tumanggor & Sazali, 2025). Konsep ini bukan sekadar modernisasi alat kerja, melainkan perubahan paradigma pelayanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Transformasi digital melibatkan pergeseran fundamental dari proses manual ke proses digital yang terintegrasi.

Menurut model teoretis yang dikembangkan oleh Vial (2021), transformasi digital terdiri dari empat komponen utama: penggunaan teknologi digital sebagai pemicu, perubahan strategis dalam proposisi nilai, perubahan struktural dalam organisasi, dan dampak positif atau negatif pada kinerja (Vial, 2021). Komponen pertama menekankan peran teknologi sebagai katalisator perubahan organisasi. Komponen kedua mengacu pada perubahan nilai yang ditawarkan kepada pengguna layanan. Komponen ketiga berkaitan dengan restrukturisasi organisasi untuk mendukung operasi digital. Komponen keempat mengukur hasil akhir dari transformasi terhadap kinerja organisasi.

Transformasi digital dalam sektor publik mengacu pada integrasi teknologi digital dalam proses administrasi dan penyampaian layanan pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan (Isma et al., 2025). Integrasi ini mencakup digitalisasi proses administrasi melalui e-government serta pemanfaatan inovasi digital untuk memperluas aksesibilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokus utama transformasi digital adalah pada peningkatan nilai layanan kepada masyarakat, bukan hanya pada penerapan teknologi semata.

Karakteristik utama transformasi digital mencakup aspek budaya, struktural, dan filosofis organisasi yang berubah secara fundamental (Tumanggor & Sazali, 2025). Perubahan budaya organisasi melibatkan pergeseran mindset dari konvensional ke digital dalam semua tingkat organisasi. Perubahan struktural mencakup restrukturisasi hierarki dan proses kerja untuk mendukung operasi digital yang lebih efisien. Perubahan filosofis berkaitan dengan perubahan nilai dan prinsip dasar dalam penyediaan layanan kepada masyarakat.

Transformasi digital membuka peluang strategis bagi sektor publik untuk meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan efisiensi operasional dan peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (Isma et al., 2025). Efisiensi operasional tercapai melalui otomatisasi proses, pengurangan waktu pelayanan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Peningkatan kepuasan masyarakat dihasilkan dari layanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan individu.

Digitalisasi merupakan proses mengubah informasi dari bentuk fisik ke bentuk digital tanpa mengubah proses kerja yang ada. Digitalisasi hanya berfokus pada konversi format data dari kertas ke file digital. Proses ini tidak mengubah cara kerja organisasi secara fundamental dan hanya bersifat teknis dalam arti sempit. Digitalisasi merupakan langkah awal sebelum digitalisasi proses dan transformasi digital.

Digitalisasi proses melibatkan perubahan cara kerja organisasi melalui penerapan teknologi digital untuk mengotomatisasi proses yang sebelumnya manual. Digitalisasi proses mengubah alur kerja dan prosedur operasional untuk meningkatkan efisiensi. Namun, digitalisasi proses masih terbatas pada optimisasi proses yang ada tanpa mengubah nilai atau proposisi layanan secara fundamental. Digitalisasi proses merupakan tahap menengah dalam perjalanan transformasi digital.

Transformasi digital berbeda dari digitalisasi dan digitalisasi proses karena mencakup perubahan menyeluruh dalam organisasi termasuk strategi, budaya, struktur, dan proposisi nilai (Vial, 2021). Transformasi digital mengubah cara organisasi berpikir, bekerja, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi tetapi tentang perubahan budaya organisasi dan nilai yang ditawarkan. Transformasi digital adalah tahap akhir dan paling mendalam dalam perjalanan digitalisasi organisasi.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, transformasi digital tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi administratif, melainkan juga sebagai strategi jangka panjang guna memperluas jangkauan dan kualitas layanan publik (Isma et al., 2025). Transformasi digital menjadi instrumen strategis untuk reformasi layanan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Strategi jangka panjang ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital, dan penyusunan regulasi yang mendukung.

Penerapan e-government yang efektif memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan secara daring, mengatasi hambatan geografis, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik (Ni'mah et al., 2026). E-government mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dari pertemuan fisik ke interaksi digital. Akses daring memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Partisipasi aktif warga negara meningkat melalui platform digital yang memudahkan pemberian masukan dan aspirasi.

Digitalisasi layanan juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Ni'mah et al., 2026). Transparansi meningkat karena data dan informasi pemerintahan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui portal digital. Akuntabilitas meningkat karena setiap proses pelayanan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara digital. Prinsip good governance seperti keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik dapat implementations lebih efektif melalui sistem digital.

E-government di bidang perpustakaan berkembang melalui empat fase, mulai dari layanan terotomasi hingga fase integrasi di mana perpustakaan terintegrasi dengan lembaga sejenis lainnya dalam penyediaan informasi koleksi dan transfer data (Widjaja, 2021). Fase pertama adalah layanan terotomasi yang melibatkan sistem perpustakaan otomatis untuk manajemen koleksi. Fase kedua adalah layanan web yang menyediakan informasi perpustakaan melalui website. Fase ketiga adalah layanan interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perpustakaan secara daring. Fase keempat adalah fase integrasi yang menghubungkan perpustakaan dengan lembaga lain dalam sistem informasi nasional.

Fase integrasi ini ditandai dengan keberadaan Katalog Induk Nasional dan sistem repository yang terintegrasi dengan lembaga lain (Vitriana, 2024). Katalog Induk Nasional memungkinkan pengguna menemukan koleksi dari berbagai perpustakaan dalam satu sistem pencarian. Sistem repository yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data dan informasi antar lembaga secara otomatis. Integrasi ini menciptakan ekosistem informasi nasional yang terhubung dan saling melengkapi.

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik, yang kini menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, didorong oleh implementasi inisiatif e-government nasional (Ni'mah et al., 2026). E-government merupakan kerangka kerja utama untuk transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Inisiatif e-government nasional mencakup berbagai program seperti sistem informasi terintegrasi, portal layanan publik daring, dan pusat data nasional. Prioritas utama pemerintah Indonesia dalam e-government adalah meningkatkan akses layanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi digital memungkinkan layanan publik disajikan secara nirkertas (paperless), cepat, dan praktis untuk menjawab tuntutan pengguna akan layanan yang cepat, murah, dan akurat (Yuliana & Anita, 2026). Layanan nirkertas mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat proses administrasi. Layanan cepat tercapai melalui otomatisasi proses dan pengurangan waktu tunggu. Layanan praktis memungkinkan masyarakat mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat digital.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan layanan informasi, termasuk sistem otomasi perpustakaan dan repositori digital (Sukatari & Suryanto, 2024). Sistem otomasi perpustakaan memungkinkan manajemen koleksi, peminjaman, dan Returned secara otomatis. Repositori digital menyediakan akses terhadap koleksi digital yang dapat diakses oleh pengguna secara daring. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi fondasi utama untuk transformasi digital perpustakaan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan Technology Acceptance Model, Innovation Diffusion Theory, dan New Public Management theory dalam konteks transformasi digital pemerintah daerah (Yang,

2025). Technology Acceptance Model menjelaskan bagaimana masyarakat menerima dan menggunakan teknologi digital dalam layanan publik. Innovation Diffusion Theory menjelaskan proses penyebaran inovasi digital dalam organisasi pemerintah. New Public Management theory menjelaskan prinsip manajemen publik modern yang berorientasi pada efisiensi dan kualitas layanan.

Hasil uji mediasi mengkonfirmasi bahwa transformasi digital sepenuhnya memediasi hubungan antara literasi teknologi dan inovasi pelayanan terhadap kinerja perangkat daerah dengan nilai Variance Accounted For sebesar 100 persen (Yang, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan prasyarat mutlak untuk mengaktualisasikan potensi sumber daya manusia dan kapabilitas inovasi organisasi. Literasi teknologi dan inovasi pelayanan hanya berdampak pada kinerja ketika diimplementasikan melalui transformasi digital yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi di Indonesia sehingga membuat pemerintah harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government (Widjaja, 2021). Perubahan tatanan birokrasi mengharuskan pemerintah beradaptasi dengan teknologi baru untuk tetap relevan dan efektif. Adopsi e-government menjadi strategi utama untuk menghadapi transformasi digital dalam birokrasi pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat termasuk di bidang perpustakaan dan kearsipan (Pura et al., 2024). Inovasi layanan mencakup pengembangan sistem informasi digital, platform layanan daring, dan aplikasi mobile untuk akses koleksi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor pendorong utama untuk transformasi digital di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Transformasi mendalam perpustakaan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti artificial intelligence, big data, dan cloud computing menggeser peran dari gudang fisik menjadi ekosistem aksesibel 24 jam sehari (Pura et al., 2024). Artificial intelligence digunakan untuk rekomendasi personalisasi koleksi kepada pengguna. Big data digunakan untuk analisis perilaku pengguna dan optimisasi layanan. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses koleksi digital dari berbagai lokasi. Pergeseran peran ini mengubah definisi perpustakaan dari tempat penyimpanan buku menjadi pusat informasi digital yang selalu terbuka.

Inovasi teknologi seperti artificial intelligence untuk rekomendasi personalisasi, blockchain untuk preservasi aman, dan virtual reality untuk pengalaman imersif telah merevolusi aksesibilitas dan efisiensi layanan perpustakaan (Khalid et al., 2025). Artificial intelligence memungkinkan sistem perpustakaan memberikan rekomendasi koleksi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan individu pengguna. Blockchain memastikan preservasi arsip digital yang aman dan tidak dapat diubah. Virtual reality menciptakan

pengalaman imersif untuk eksplorasi koleksi secara virtual. Teknologi ini mengubah cara perpustakaan memberikan layanan dan berinteraksi dengan pengguna.

Perpustakaan hybrid menjadi model modern yang mengurangi ketergantungan pada koleksi fisik sambil memperluas jangkauan global melalui portal digital dan sistem temu kembali informasi canggih (Nafsi & Octavia, 2024). Perpustakaan hybrid menggabungkan koleksi fisik dan digital dalam satu layanan yang terintegrasi. Pengurangan ketergantungan pada koleksi fisik memungkinkan perpustakaan menyediakan lebih banyak ruang untuk aktivitas lain. Perluasan jangkauan global memungkinkan pengguna dari berbagai negara mengakses koleksi perpustakaan. Sistem temu kembali informasi canggih memudahkan pengguna menemukan koleksi yang mereka butuhkan.

Keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil Indonesia menjadi tantangan teknis yang krusial untuk transformasi digital perpustakaan (Pura et al., 2024). Infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet dan perangkat komputer masih terbatas di banyak wilayah terpencil. Keterbatasan infrastruktur menghambat akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan digital. Tantangan ini memerlukan investasi strategis dan kebijakan adaptif untuk mengatasi kesenjangan digital antar wilayah.

Tantangan teknis lainnya mencakup digitalisasi masif koleksi, isu keamanan cloud dan hak cipta yang menuntut investasi strategis serta kebijakan adaptif untuk mengatasi kesenjangan digital dan obsolesensi format (Fiqori et al., 2026). Digitalisasi masif koleksi memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar untuk mengubah seluruh koleksi fisik menjadi digital. Keamanan cloud memastikan data digital tidak hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak cipta menjadi isu kompleks dalam digitalisasi koleksi yang melibatkan pemilik karya asli. Obsolesensi format terjadi ketika format digital lama tidak dapat dibaca oleh teknologi baru.

Integrasi smart library dan aplikasi mobile muncul sebagai solusi inovatif yang didukung kolaborasi institusional guna memaksimalkan partisipasi pengguna (Khalid et al., 2025). Smart library menggunakan teknologi sensor dan IoT untuk memantau penggunaan ruang dan koleksi secara real-time. Aplikasi mobile memungkinkan pengguna mengakses koleksi perpustakaan dari perangkat ponsel mereka. Kolaborasi institusional antara berbagai perpustakaan dan lembaga informasi memperkuat ekosistem digital nasional. Solusi ini meningkatkan partisipasi pengguna dalam menggunakan layanan perpustakaan digital.

Infrastruktur teknologi menjadi faktor penentu pertama dalam keberhasilan transformasi digital perpustakaan dan kearsipan daerah (Amri & Kurniawan, 2025). Infrastruktur mencakup jaringan internet, perangkat komputer, server, dan sistem penyimpanan data. Infrastruktur yang memadai memungkinkan operasi digital yang stabil dan efisien. Tanpa infrastruktur yang baik, transformasi digital tidak dapat berjalan

secara optimal. Pembangunan infrastruktur digital harus menjadi prioritas utama dalam strategi transformasi digital.

Sumber daya manusia menjadi faktor penentu kedua yang kritis dalam transformasi digital perpustakaan (Fiqori et al., 2026). Kompetensi SDM mencakup kemampuan menggunakan teknologi digital, analisis data, cybersecurity, dan integrasi AI. Skill gap pustakawan senior dalam teknologi digital menghambat adopsi penuh transformasi digital. Pelatihan ulang intensif melalui blended learning, mentoring antar-generasi, dan insentif karir seperti sertifikasi digital menjadi imperatif untuk menjembatani ketidaksiapan SDM. Pengembangan SDM berkelanjutan merupakan kunci untuk keberhasilan transformasi digital.

Kebijakan dan tata kelola menjadi faktor penentu ketiga dalam keberhasilan transformasi digital (Vial, 2021). Kebijakan mencakup regulasi, standar operasional, dan pedoman implementasi transformasi digital. Tata kelola meliputi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan. Kebijakan yang adaptif dan tata kelola yang efektif memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Regulasi yang mendukung akses layanan secara universal dan koordinasi antar-instansi menjadi penting untuk transformasi digital yang berhasil.

Literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu keempat yang harus dikembangkan secara balanced dengan transformasi digital dan evaluasi kepuasan layanan (Yuan et al., 2023). Literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi digital, mencari informasi, dan kualitas informasi. Informasi literasi terbukti bertindak sebagai jembatan antara kualitas layanan digital dan tingkat kepuasan pengguna. Program literasi digital yang kuat dan evaluasi layanan berkelanjutan memastikan perpustakaan tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna di era digital. Ketiga aspek ini harus dikembangkan secara seimbang untuk keberhasilan transformasi digital.

Strategi Transformasi Digital pada Layanan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Strategi transformasi digital pada layanan informasi perpustakaan dan kearsipan daerah harus dimulai dari penataan arah kelembagaan, bukan dari pengadaan teknologi semata. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh keselarasan antara visi organisasi, kebutuhan pengguna, kapasitas sumber daya, dan desain layanan yang ingin dicapai (Vial, 2021). Dalam konteks perpustakaan dan kearsipan daerah, strategi ini perlu dirancang untuk memperluas akses informasi, mempercepat temu kembali data, dan memperkuat preservasi koleksi serta arsip secara berkelanjutan (Yuliana & Anita, 2026). Karena itu, transformasi digital harus dipahami sebagai agenda perubahan organisasi yang terencana, bertahap, dan berorientasi pada manfaat publik.

Langkah strategis pertama adalah melakukan analisis kebutuhan layanan secara komprehensif. Analisis ini mencakup pemetaan kondisi eksisting koleksi, sistem layanan, jenis arsip, infrastruktur TIK, kemampuan pegawai, serta pola kebutuhan informasi masyarakat (Amri & Kurniawan, 2025). Kebutuhan transformasi digital tidak dapat ditentukan hanya dari tren nasional, tetapi harus disesuaikan dengan konteks daerah, terutama karakter geografis, sebaran penduduk, dan tingkat literasi digital pengguna. Dengan analisis kebutuhan yang kuat, instansi dapat menetapkan prioritas digitalisasi yang realistis, terukur, dan sesuai kapasitas organisasi.

Strategi kedua adalah membangun tata kelola transformasi digital yang jelas. Tata kelola ini meliputi penetapan regulasi internal, pembagian tugas antarbidang, standar operasional prosedur, target kinerja, serta mekanisme evaluasi berkala (Tumanggor & Sazali, 2025). Tanpa tata kelola yang kuat, digitalisasi sering berhenti pada proyek jangka pendek yang tidak terintegrasi dengan sistem kerja organisasi. Oleh sebab itu, pimpinan dinas harus menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari kebijakan kelembagaan, bukan sekadar inovasi teknis yang berdiri sendiri.

Strategi ketiga adalah pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan berkelanjutan. Infrastruktur tersebut mencakup jaringan internet yang stabil, server atau cloud storage, perangkat komputer, scanner arsip, sistem keamanan data, serta aplikasi layanan digital. Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama transformasi digital di banyak perpustakaan daerah, khususnya di wilayah yang akses teknologinya belum merata (Fiqori et al., 2026). Karena itu, investasi infrastruktur harus diarahkan pada kebutuhan inti layanan, bukan pada pengadaan perangkat yang tidak terhubung dengan tujuan operasional.

Strategi keempat adalah digitalisasi koleksi perpustakaan dan arsip secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Digitalisasi tidak harus dilakukan serentak pada seluruh bahan pustaka dan arsip, tetapi dapat dimulai dari koleksi yang paling sering diakses, arsip vital, dokumen langka, dan bahan yang rentan rusak (Yablonsky, 2018). Pendekatan bertahap ini lebih efisien dari sisi biaya, tenaga, dan pengendalian mutu. Selain itu, digitalisasi prioritas memungkinkan lembaga segera menghasilkan manfaat layanan yang dapat dirasakan publik dalam waktu lebih cepat.

Strategi kelima adalah membangun sistem informasi layanan yang terintegrasi. Pengembangan perpustakaan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan file elektronik, tetapi harus didukung oleh metadata, katalog daring, mesin pencarian, klasifikasi koleksi, dan sistem manajemen akses yang baik (Vitriana, 2024). Dalam bidang kearsipan, integrasi juga penting agar arsip digital dapat dihubungkan dengan sistem layanan informasi kearsipan yang lebih luas, termasuk simpul jaringan nasional seperti SIKS dan JIKN (Tiwari et al., 2024). Integrasi sistem akan mempercepat temu kembali informasi, mengurangi duplikasi kerja, dan meningkatkan akurasi pengelolaan data.

Strategi keenam adalah mengembangkan layanan berbasis pengguna atau user-centered service. Transformasi digital harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat,

seperti kemudahan pencarian informasi, akses jarak jauh, layanan mandiri, dan kecepatan respons layanan (Perpusnas, 2022). Karena itu, desain platform digital perlu sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses melalui perangkat yang umum digunakan masyarakat, terutama telepon genggam. Pendekatan berbasis pengguna juga berarti lembaga harus rutin mengumpulkan umpan balik pengguna untuk memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.

Strategi ketujuh adalah memperkuat kompetensi digital pustakawan dan tenaga kearsipan. Literatur menunjukkan bahwa transformasi digital sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan kepribadian SDM dalam menghadapi perubahan teknologi (Vitriana, 2024). Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya mencakup pengoperasian aplikasi, tetapi juga literasi data, manajemen informasi digital, keamanan siber, kurasi konten, dan pelayanan daring. Tanpa SDM yang siap, perangkat digital hanya akan menjadi fasilitas pasif yang tidak menghasilkan perubahan layanan yang berarti.

Strategi kedelapan adalah melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara terstruktur. Pelatihan harus dirancang berbasis kebutuhan jabatan dan level kompetensi, bukan dilakukan secara umum tanpa tindak lanjut. Pengalaman implementasi program digitalisasi perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa dukungan kepemimpinan, pegawai yang kompeten, serta pelatihan dan pengembangan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan inovasi layanan digital (Hofifa et al., 2025). Dengan demikian, pelatihan perlu dijadikan program berkelanjutan yang terhubung langsung dengan target transformasi organisasi.

Strategi kesembilan adalah memperkuat keamanan informasi dan tata kelola arsip digital. Digitalisasi membuka peluang akses yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan risiko kebocoran data, kerusakan file, manipulasi dokumen, dan ketergantungan pada pihak ketiga (Khalid et al., 2025). Karena itu, lembaga perlu menerapkan standar keamanan seperti backup berkala, kontrol akses, audit jejak digital, dan penyimpanan berlapis. Dalam bidang kearsipan, keamanan bukan hanya isu teknis, tetapi juga menyangkut keabsahan informasi, perlindungan memori institusi, dan kepastian hukum dokumen.

Strategi kesepuluh adalah menyusun kebijakan akses, hak penggunaan, dan regulasi informasi digital secara jelas. Pengembangan perpustakaan digital membutuhkan aturan mengenai hak akses pengguna, pemanfaatan koleksi, perlindungan hak cipta, dan etika distribusi informasi digital (Nafsi & Octavia, 2024). Pada layanan arsip, kebijakan juga harus membedakan arsip terbuka, terbatas, dan rahasia agar digitalisasi tidak menimbulkan masalah hukum. Kejelasan regulasi akan memberi kepastian bagi pengelola dan pengguna sekaligus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan dokumen.

Strategi kesebelas adalah memperluas kolaborasi institusional. Transformasi digital perpustakaan dan kearsipan daerah akan lebih efektif jika dilakukan melalui kerja

sama dengan Perpustakaan Nasional, dinas komunikasi dan informatika, sekolah, perguruan tinggi, desa, dan komunitas literasi lokal (Yuliana & Anita, 2026). Kolaborasi dapat memperkuat dukungan infrastruktur, transfer pengetahuan, standarisasi metadata, promosi layanan, dan pemerataan akses informasi. Dalam konteks daerah, kemitraan lintas sektor juga penting untuk menjangkau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Strategi kedua belas adalah mengembangkan inovasi layanan digital yang kontekstual. Inovasi yang berhasil bukan yang paling canggih, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kapasitas organisasi. Contoh dari daerah lain menunjukkan bahwa program digitalisasi berbasis web dapat meningkatkan jumlah kunjungan, minat baca, dan efektivitas layanan ketika dirancang sederhana, terarah, dan mudah digunakan masyarakat (Hoffa et al., 2025). Oleh karena itu, perpustakaan dan kearsipan daerah perlu mengembangkan inovasi seperti katalog daring, layanan referensi digital, arsip digital tematik, dan promosi literasi melalui media sosial secara adaptif.

Strategi ketiga belas adalah membangun sistem evaluasi kinerja transformasi digital yang berbasis indikator. Evaluasi perlu mengukur aspek input, proses, output, dan outcome, seperti jumlah koleksi yang terdigitalisasi, kecepatan layanan, tingkat penggunaan platform, kepuasan pengguna, serta dampaknya terhadap akses informasi publik (Yuan et al., 2023). Tanpa evaluasi yang terstruktur, organisasi sulit menilai apakah transformasi digital benar-benar meningkatkan kualitas layanan atau hanya mengubah medianya. Evaluasi juga penting untuk memperbaiki desain program dan mendukung keputusan anggaran pada periode berikutnya.

Strategi keempat belas adalah memastikan bahwa transformasi digital tetap inklusif dan berorientasi pada pemerataan layanan. Tidak semua masyarakat memiliki akses perangkat, jaringan internet, dan kemampuan digital yang sama, sehingga layanan digital harus tetap dipadukan dengan pendekatan hibrida agar tidak menciptakan eksklusi baru (Azizah et al., 2025). Perpustakaan dan kearsipan daerah perlu memposisikan transformasi digital sebagai sarana perluasan layanan, bukan pengganti mutlak layanan tatap muka. Dengan pendekatan hibrida, lembaga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda sambil tetap menjaga prinsip keadilan akses informasi publik.

Kesimpulan

Strategi transformasi digital layanan informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas harus dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh, bertahap, dan berbasis kebutuhan kelembagaan serta kebutuhan masyarakat. Kondisi kearsipan dan layanan informasi di Sambas masih menghadapi kendala pada aspek sarana-prasarana, klasifikasi arsip, kemampuan pelaksana, dan prioritas anggaran, sehingga transformasi digital tidak cukup dilakukan lewat digitalisasi

dokumen saja, tetapi harus mencakup penguatan tata kelola, infrastruktur teknologi, sistem layanan terintegrasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pada saat yang sama, arah kebijakan nasional menunjukkan bahwa digitalisasi perpustakaan telah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperluas akses informasi, mempercepat layanan, dan menjaga relevansi perpustakaan di tengah perubahan perilaku pengguna informasi.

Dengan demikian, strategi yang paling relevan bagi Kabupaten Sambas adalah memadukan digitalisasi koleksi dan arsip prioritas, pengembangan layanan berbasis web atau mobile, pelatihan teknis staf, penguatan kolaborasi lintas lembaga, serta evaluasi layanan secara berkala. Penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi digital yang berhasil sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan, pegawai yang kompeten, pengembangan kapasitas berkelanjutan, dan inovasi layanan yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui internet dan media sosial. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas dapat bertransformasi dari lembaga layanan informasi yang masih dominan konvensional menjadi institusi publik yang lebih efektif, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat daerah.

Daftar Rujukan

- Amri, C., & Kurniawan, K. (2025). Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi di Era Digital | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
<https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/9918>
- Azizah, F. P., Makdis, N., & Maisaroh, D. (2025). Transformasi Layanan Perpustakaan Menuju Smart Library: Kajian Inovasi Teknologi dan Adopsi Pengguna. *Maktabatuna: Jurnal Kajian Kepustakawanan*, 7(2), 198–213.
<https://doi.org/10.15548/mj.v7i2.12342>
- Azmam, A. A. S., Rusfita, H. Z., & Marintan, M. A. (2025). Strategi Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali dalam Pelestarian Budaya Lokal melalui Media Digital. *Buletin Perpustakaan*, 8(2), 293–313. <https://doi.org/10.20885/bpuui.v8i2.40906>
- Fiqori, A. F., Irawati, I., Faruq, U., & Fahriza, A. (2026). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Perpustakaan di SMA Negeri 5 Pekanbaru. *Social Science Academic*, 4(1), 183–192. <https://doi.org/10.37680/ssa.9667>
- Hofifa, ifa, Nina Sa'idah Fitriyah, nina, & Vita Novianti, V. N. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM DIGITALISASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (TALI PUSAR) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SITUBONDO [Other, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO].
<https://repository.unars.ac.id/id/eprint/3450/>
- Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, M., Fadhillah, S. K., Kn, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 66–77.
- Khalid, M. I., Siregar, Y. H., & Muthi, D. I. (2025). Transformasi Digital Layanan Perpustakaan Madrasah melalui Pengembangan Website Inovatif untuk

- Optimalisasi Koleksi dan Laporan Terpadu. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.55537/gabdimas.v3i1.1054>
- Nafsi, B. I., & Octavia, L. N. (2024). ANALISIS LITERATUR TENTANG INOVASI LAYANAN PERPUSTAKAAN ERA DIGITAL: TINJAUAN KOMPREHENSIF. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(2), 182–190. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v3i2.9677>
- Ni'mah, N., Fabriar, S. R., Fitri, A. N., & Pangestu, A. C. (2026). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dalam Pemanfaatan Media Digital untuk Informasi dan Promosi. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 257–272. <https://doi.org/10.30812/adma.v6i2.5281>
- Pura, R., Tafsir, M., Stambul, I., Sambo, E. M., Bungatang, Pongkapadang, G., Themba, O. S., Hamiddin, M. I. N., & Syam, J. (2024). Transformasi Digital Perpustakaan: Mengadopsi Teknologi Terbaru untuk Meningkatkan Layanan. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2), 404–412.
- Santosa, J. (2025). Transformasi Perpustakaan Akademik di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Buletin Perpustakaan*, 8(2), 201–210. <https://doi.org/10.20885/bpuui.v8i2.40822>
- Sari, R. Y., & Zulaikha, S. R. (2020). PENGELOLAAN ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 979–986. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.42584>
- Sukatari, N. K., & Suryanto, S. (2024). Implementasi dan prospek pengembangan digitalisasi pada perpustakaan umum di Indonesia. *Librarium: Library and Information Science Journal*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.53088/librarium.v1i1.683>
- Tiwari, M., Bryde, D. J., Stavropoulou, F., Dubey, R., Kumari, S., & Foropon, C. (2024). Modelling supply chain Visibility, digital Technologies, environmental dynamism and healthcare supply chain Resilience: An organisation information processing theory perspective. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 188, 103613. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103613>
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1657–1669. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>
- Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. In *Managing Digital Transformation*. Routledge.
- Vitriana, N. (2024). Transformasi perpustakaan di era digital native. *Librarium: Library and Information Science Journal*, 1(1), 59–69. <https://doi.org/10.53088/librarium.v1i1.693>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Wibawa, A. E. Y. (2021). IMPLEMENTASI PLATFORM DIGITAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DI MI MUHAMMADIYAH PK KARTASURA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Berajah Journal*, 1(2), 76–84. <https://doi.org/10.47353/bj.v1i2.27>

- Widjaja, M. P. & A. (2021). *Strategi dan Transformasi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yablonsky, S. (2018). A Multidimensional Framework for Digital Platform Innovation and Management: From Business to Technological Platforms. *Systems Research and Behavioral Science*, 35(4), 485–501. <https://doi.org/10.1002/sres.2544>
- Yang, Q. (2025). Principles for the Standardized Handling of Digital Property Inheritance. *Humanities and Social Science Research*, 8(3), p29–p29. <https://doi.org/10.30560/hssr.v8n3p29>
- Yuan, Y., Tan, H., & Liu, L. (2023). The effects of digital transformation on supply chain resilience: A moderated and mediated model. *Journal of Enterprise Information Management*, 37(2), 488–510. <https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2022-0333>
- Yuliana, S., & Anita, D. (2026). Pelayanan Publik Digital sebagai Instrumen Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 13973–13980. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5407>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. (2021). *Peraturan Bupati Sambas Nomor 91 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas*. Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2022). Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Digitalisasi perpustakaan di Indonesia sudah jadi kebutuhan mendesak.
- Sekuduk. (2023, November 15). Pembinaan tenaga perpustakaan desa di Kabupaten Sambas. *Desa Sekuduk*.